

PERKUMPULAN PROGRAM STUDI DAN DOSEN
HUKUM EKONOMI SYARIAH INDONESIA (POSDHESI)

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 085/IX/POSDHESI/2026

TENTANG

HASIL PEMETAAN PERKEMBANGAN PEMINAT PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM PERIODE 2023–2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

Jabatan : [Ketua Umum/Ketua/Pengurus POSDHESI]

Organisasi : Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi
Syariah Indonesia (POSDHESI)

Alamat : Yogyakarta

dengan ini menyatakan bahwa Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (POSDHESI) telah melakukan penelusuran dan pemetaan awal terhadap perkembangan jumlah peminat Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, khususnya pada periode 2023 sampai dengan 2025.

Pemetaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari perhatian akademik POSDHESI terhadap perkembangan pendidikan Hukum Ekonomi Syariah, keberlanjutan program studi, dinamika pilihan calon mahasiswa, serta relevansi lulusan HES terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

A. DASAR PEMETAAN

Pemetaan perkembangan peminat Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dilakukan dengan memperhatikan informasi dan data yang dapat ditelusuri dari berbagai sumber, antara lain:

1. Data penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
2. Informasi penerimaan mahasiswa baru yang dipublikasikan oleh perguruan tinggi;

3. Data dan informasi akademik yang tersedia pada sistem informasi pendidikan tinggi;
4. Informasi penerimaan melalui jalur nasional maupun jalur mandiri;
5. Dokumen dan informasi program studi yang tersedia secara terbuka;
6. Informasi dan komunikasi dengan pengelola Program Studi Hukum Ekonomi Syariah; dan
7. Sumber informasi lain yang relevan dengan perkembangan peminat Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Pemetaan dilakukan terhadap perkembangan jumlah peminat, pendaftar, peserta seleksi, mahasiswa yang diterima, dan/atau mahasiswa yang melakukan registrasi, sepanjang data tersebut tersedia dan dapat diverifikasi.

B. HASIL PEMETAAN

Berdasarkan penelusuran POSDHESI terhadap periode 2023–2025, ditemukan adanya perubahan pola permintaan terhadap Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada sejumlah perguruan tinggi keagamaan Islam.

Perubahan tersebut tidak dapat secara seragam dikategorikan sebagai penurunan pada seluruh perguruan tinggi, karena terdapat variasi antarinstansi. Sebagian program studi menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah peminat, sebagian mengalami stagnasi atau fluktuasi, sementara sebagian lainnya masih mampu mempertahankan atau meningkatkan jumlah peminat.

Dengan demikian, POSDHESI memandang bahwa fenomena yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai perubahan dan redistribusi minat calon mahasiswa terhadap Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan indikasi penurunan peminat pada sejumlah program studi.

Pola tersebut menjadi perhatian karena terjadi dalam lingkungan pendidikan tinggi yang semakin kompetitif dan ketika calon mahasiswa memiliki semakin banyak alternatif program studi yang menawarkan bidang keilmuan yang berdekatan.

C. INDIKASI FAKTOR YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Berdasarkan hasil penelusuran awal dan diskusi akademik di lingkungan POSDHESI, terdapat beberapa faktor yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Pertama, persoalan identitas dan positioning program studi.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah memiliki karakter multidisipliner yang menggabungkan hukum, ekonomi dan bisnis, serta ilmu syariah. Karakter tersebut menjadi distingsi sekaligus kekuatan akademik, namun pada saat yang sama menimbulkan ketidakjelasan bagi calon mahasiswa mengenai identitas dan profesi lulusan.

Kedua, persaingan dengan program studi yang beririsan.

Calon mahasiswa memiliki berbagai pilihan program studi seperti Ilmu Hukum, Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Manajemen, Akuntansi, dan program studi lainnya. Sebagian program studi tersebut menawarkan identitas akademik dan jalur profesi yang relatif lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Persaingan semakin ketat dengan kehadiran program studi yang memiliki bukan lagi irisan namun kajian yang sama yaitu hukum bisnis dalam satu perguruan tinggi dan fakultas sekaligus.

Ketiga, persepsi terhadap prospek karier lulusan.

Terdapat kebutuhan untuk memperjelas hubungan antara kompetensi lulusan HES dengan dunia kerja, termasuk bidang hukum bisnis, *sharia compliance*, industri halal, lembaga keuangan syariah, regulasi, penyelesaian sengketa, legal corporate, ekonomi digital, *fintech*, *e-commerce*, dan bidang pekerjaan baru lainnya.

Keempat, perubahan orientasi calon mahasiswa.

Generasi calon mahasiswa saat ini semakin mempertimbangkan manfaat praktis pendidikan, peluang kerja, pengembangan kompetensi, mobilitas karier, teknologi, lingkungan pembelajaran, reputasi institusi, dan relevansi program studi dengan masa depan.

Kelima, kurikulum yang tidak adaptif terhadap perkembangan ekosistem dan teknologi.

Transformasi dalam ekosistem ekonomi yang cenderung mengakomodasi digitalisasi, perkembangan kecerdasan buatan, *fintech*, *marketplace*, kontrak digital, industri halal, perlindungan data, kepatuhan, dan keberlanjutan telah mengubah kebutuhan kompetensi di dunia kerja. Kenyataannya mayoritas program studi HES masih menjadikan kajian fikih muamalah klasik sebagai inti kajian dan cenderung mengabaikan perubahan tersebut.

Keenam, visibilitas dan komunikasi program studi.

Daya tarik program studi tidak hanya ditentukan oleh kualitas aktual, tetapi juga oleh sejauh mana calon mahasiswa memperoleh informasi yang jelas mengenai keunggulan program, pengalaman pembelajaran, kompetensi lulusan, jaringan industri, alumni, sertifikasi, dan prospek karier.

D. POSISI DAN SIKAP AKADEMIK POSDHESI

Atas dasar hasil pemetaan tersebut, POSDHESI menyatakan bahwa fenomena perubahan jumlah peminat Program Studi Hukum Ekonomi Syariah merupakan persoalan strategis pendidikan tinggi yang perlu ditangani secara berbasis data, sistematis, dan kolaboratif.

POSDHESI tidak memandang perubahan jumlah peminat semata-mata sebagai persoalan promosi penerimaan mahasiswa baru. Fenomena tersebut perlu dianalisis secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

1. Student choice, yaitu proses pengambilan keputusan calon mahasiswa;
2. Program positioning, yaitu posisi dan identitas HES dibandingkan program studi alternatif;
3. Career value, yaitu persepsi terhadap manfaat dan prospek karier lulusan;
4. Perceived employability, yaitu persepsi mengenai kesiapan lulusan memasuki dunia kerja;
5. Institutional reputation and signals, yaitu reputasi, akreditasi, alumni, fasilitas, kerja sama, dan informasi institusional;
6. Social influence, termasuk pengaruh orang tua, guru, teman sebaya, alumni, dan lingkungan sosial;
7. Digital visibility, yaitu kemampuan program studi menyampaikan identitas dan relevansinya melalui ekosistem digital; dan
8. Competitive environment, yaitu persaingan dengan program studi lain yang memiliki bidang keilmuan dan prospek kerja yang beririsan.

Oleh karena itu, POSDHESI menegaskan bahwa penurunan peminat pada sebagian Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tidak dapat ditafsirkan sebagai menurunnya relevansi keilmuan Hukum Ekonomi Syariah. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membedakan antara penurunan permintaan, stagnasi, fluktuasi, dan redistribusi pilihan calon mahasiswa.

E. REKOMENDASI POSDHESI

Berdasarkan hasil pemetaan awal tersebut, POSDHESI merekomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan nasional yang lebih komprehensif terhadap perkembangan peminat HES sekurang-kurangnya dalam rentang 2023–2025 dan dilanjutkan secara berkala.
2. Membangun basis data nasional Program Studi HES yang mencakup kapasitas penerimaan, jumlah peminat, pendaftar, mahasiswa diterima, mahasiswa registrasi, mahasiswa aktif, lulusan, masa tunggu kerja, dan bidang pekerjaan lulusan.
3. Melakukan penelitian empiris mengenai student choice untuk mengetahui alasan calon mahasiswa memilih atau tidak memilih HES.
4. Melakukan evaluasi positioning dan diferensiasi HES dibandingkan program studi yang memiliki bidang keilmuan berdekatan.
5. Memperkuat career pathway lulusan HES dengan membangun hubungan yang lebih sistematis antara kurikulum, kompetensi, sertifikasi, magang, industri, profesi, dan kebutuhan dunia kerja.
6. Melakukan transformasi kurikulum secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan fondasi hukum Islam dan fikih muamalah sekaligus

- memperkuat hukum bisnis, regulasi, kepatuhan, industri halal, ekonomi digital, teknologi, kecerdasan buatan, perlindungan data, dan keberlanjutan.
7. Memperkuat kolaborasi antara Program Studi HES, dunia usaha, dunia industri, lembaga keuangan syariah, industri halal, lembaga profesi, lembaga pemerintah, pengadilan, dan organisasi profesi.
 8. Mengembangkan strategi komunikasi dan digital branding HES yang mampu menjelaskan secara sederhana identitas, kompetensi, keunggulan, dan prospek karier lulusan.
 9. Mengembangkan tracer study dan alumni tracking secara nasional sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat *institutional signals* dan memberikan informasi faktual kepada calon mahasiswa.
 10. Melakukan kajian lanjutan berbasis mixed methods untuk memperoleh penjelasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah peminat HES.

F. PENEGASAN

POSDHESI memandang bahwa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah memiliki posisi strategis dalam pengembangan sumber daya.

Perubahan lingkungan ekonomi, perkembangan industri halal, pertumbuhan ekonomi digital, transformasi teknologi, dan munculnya kecerdasan buatan justru membuka ruang pengembangan keilmuan HES yang semakin luas.

Namun demikian, relevansi akademik tidak secara otomatis menghasilkan daya tarik mahasiswa. Relevansi tersebut harus diterjemahkan menjadi identitas program yang jelas, kompetensi yang terukur, jalur karier yang dapat dipahami, pengalaman pembelajaran yang relevan, serta keterhubungan yang nyata dengan dunia kerja.

Atas dasar itu, POSDHESI menyatakan bahwa hasil pemetaan periode 2023–2025 merupakan sinyal akademik dan kelembagaan yang perlu mendapatkan perhatian serius, sekaligus menjadi dasar untuk melakukan penelitian nasional yang lebih komprehensif mengenai perubahan permintaan terhadap Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

POSDHESI mendorong seluruh perguruan tinggi penyelenggara Program Studi Hukum Ekonomi Syariah untuk menjadikan kondisi tersebut sebagai momentum melakukan evaluasi, inovasi, reposisi, dan transformasi program studi, tanpa meninggalkan fondasi keilmuan hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya sebagai dokumen akademik dan kelembagaan POSDHESI serta sebagai dasar bagi pengembangan kajian lebih lanjut mengenai keberlanjutan dan penguatan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

Semarang, 18 September 2026

Ketua Umum,



Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.